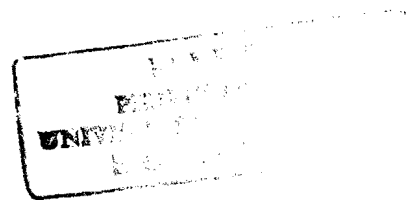


**“STRUKTUR KINERJA PERBANKAN SYARIAH
DI JAWA TIMUR”
(STUDI LIMA BANK SYARIAH DI JAWA TIMUR
PERIODE JUNI 1996-DESEMBER 2002)**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN**



LYLA RACHMANINGTYAS

No. Pokok : 049916271

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

SKRIPSI

**“STRUKTUR KINERJA PERBANKAN SYARIAH
DI JAWA TIMUR”
(STUDI KASUS 5 BANK SYARIAH DI JAWA TIMUR
PERIODE JUNI 1996-DESEMBER 2002)**

DIAJUKAN OLEH :

LYLA RACHMANINGTYAS

No. Pokok : 049916271

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Drs. Ec. H. Suherman Rosyidi, M.Com

TANGGAL 18 Maret 2004

KETUA PROGRAM STUDI,



Dra. Ec. Hj. Sri Kusreni, M.Si

TANGGAL 18 Maret 2004

ABSTRAK

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Perubahan ini disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum dan sosial. Deregulasi dan penerapan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sektor moneter dan riil telah menyebabkan sektor perbankan lebih mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja makro ekonomi di Indonesia. Sehingga Keberadaan lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi sektor riil dengan pemilik dana (*agent of economic development*). Akhirnya fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi diarahkan pada *how to make money effective and efficient to increase economic value*.

Keberadaan kebijakan-kebijakan perbankan syariah dalam Undang-undang. UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil dan secara rinci dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada tahun 1998 dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memiliki landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan system perbankan syaria'ah. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Setelah kedua perangkat hukum tersebut diberlakukan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat

Dengan analisis menggunakan kerangka SCP (*structure conduct performance*) memperlihatkan bahwa struktur perbankan syariah di Jawa Timur adalah oligopoli Cournot. *Performance* yang dihasilkan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlihat pada tingginya biaya intermediasi, adanya pembiayaan bermasalah dan belum mensosialisasinya bank syariah sehingga masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Berdasarkan analisis ekonometri memperlihatkan bahwa tidak semua hipotesis dapat dibuktikan karena pada model persamaan awal terjadi multikolinearitas yang tidak dapat diobati. Setelah dilakukan regresi dengan *stepwise* diperoleh variabel independen ASET, CAR dan LDR mempengaruhi secara signifikan variabel dependen ROA.